

Penerapan Website E-Government Dalam Pendataan Infrastruktur Dan Fasilitas Publik

Mohamad Rakhmansyah¹, Meri Mayang Sari*², Denny Andwiyani³, Sugeng Widada⁴

¹Program Studi Manajemen Ritel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Raharja

²Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Raharja

^{3,4}Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Raharja

Email : 1rakhmansyah@raharja.info, *2meri.mayang@raharja.info, 3andwiyani@raharja.info,

4sugeng.widada@raharja.info

Abstrak

Peningkatan kinerja pemerintah kecamatan akan dibantu oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam sistem manajemen fasilitas sosial dan umum. Untuk mengatasi masalah pendataan fasilitas sosial dan umum, Kantor Kecamatan Pasar Kemis masih menggunakan sistem pengelolaan infrastruktur dan fasilitas yang tidak berbasis web. Sistem ini masih menggunakan sistem semi-komputer, di mana data infrastruktur dan fasilitas dicatat pada kertas dan kemudian direkapitulasi kembali untuk membuat laporan fasilitas sosial dan umum. Sistem ini masih memiliki kekurangan, seperti kesulitan mencari data, kemungkinan kesalahan pendataan, data bertumpuk, dan proses pembuatan pelaporan yang membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menyarankan sistem pengelolaan fasilitas sosial dan umum berbasis web, yang tertata dalam penyimpanan data dan membuat pendataan fasilitas menjadi lebih mudah dan mempersingkat waktu. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan studi buku. Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan semua data. Prototype sistem dibuat menggunakan aplikasi Adobe XD. Peneliti menggunakan metode SWOT untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Codeigniter. Metode Black Box Testing digunakan untuk menguji sistem tersebut. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pengelolaan data infrastruktur dan fasilitas menjadi lebih mudah, dan ini membantu dalam proses pendataan, pencarian, dan pembuatan laporan untuk fasilitas sosial dan umum.

Kata Kunci— Sistem Pengelolaan Infrastruktur, Pengelolaan Data, Pendataan Fasilitas sosial dan umum

Abstract

The development of science and technology in the management system of social and public facilities will assist in improving the performance of the sub-district government. Currently, the Pasar Kemis District office does not yet have a web-based infrastructure and facility management system to overcome the problem of collecting data on social and public facilities that still use a semi-computer system, namely recording infrastructure and facility data using paper, then recapitulation is carried out to make reports on social facilities. And general. This system still has shortcomings such as difficulty in finding data, allowing errors in data collection, data piling up and requiring a long time in the reporting process. To overcome the problems faced, the authors propose a web-based social and public facility management system so that data collection on facilities becomes easier, shortens time, is organized in data storage. The author uses the method of Observation, Interview, and Literature Study in collecting data. All data are summarized and then clearly described in the Unified Modeling Language (UML). Making a prototype system using Adobe XD application and in analyzing the advantages and disadvantages of the system, the researcher uses the SWOT method. This system is made using

the PHP programming language with the Codeigniter framework. The system was tested using the Black Box Testing method. The computerized system makes it easier to manage infrastructure and facilities data so as to assist in the data collection process, data retrieval and reporting of social and public facilities.

Keywords—*Web-based system, Data Management, Data Collection of social and public facilities*

1. PENDAHULUAN

Kantor Kecamatan adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya. Ini termasuk bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pembinaan kehidupan masyarakat, serta urusan pelayanan umum lainnya yang dimandatkan oleh bupati.

Kantor Kecamatan Pasar Kemis adalah kantor pemerintahan yang bertanggung jawab atas 9 kelurahan. Tidak hanya mengurus bagian pelayanan umum, tetapi juga aset kelurahan seperti jalan, saluran air, sekolah, rumah sakit posyandu, dan lainnya. Agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik, diperlukan sistem yang membantu mengelola data fasilitas sosial dan umum.

Hasil observasi dan wawancara dengan pihak berwenang menunjukkan bahwa sistem di Kantor Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani data infrastruktur dan fasilitas. Namun, dia masih menggunakan pencatatan semi-komputer dan laporan pendataannya masih ditulis tangan, yang memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan. Data yang dibutuhkan menjadi lebih sulit ditemukan karena mereka bertumpuk, dan dalam beberapa kasus, mereka juga sulit dibaca. Karena masih menggunakan tulis tangan, memerlukan waktu lebih lama untuk menyamakan kembali data saat ingin digunakan untuk musyawarah rencana pembangunan agar data yang dihasilkan valid dan dapat dibuktikan. Dalam beberapa kasus, data juga sulit dibaca karena masih ditulis tangan. Saat data ingin digunakan dalam musyawarah rencana pembangunan, lebih memerlukan waktu untuk menyamakan kembali data agar menjadi valid dan dapat dibuktikan.

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara cepat, tepat, akurat, dan mudah digunakan, Kantor Kecamatan Pasar Kemis membutuhkan sistem yang mendukung pendataan fasilitas sosial dan umum. Kecamatan Pasar Kemis membutuhkan sistem E-Government untuk memenuhi kebutuhan data untuk musyawarah rencana pembangunan yang diadakan setiap tahun dan untuk memantau kondisi fasilitas sosial dan umum di Kecamatan Pasar Kemis.

Peneliti juga mengacu pada beberapa studi sebelumnya. Dalam penelitian serupa, telah dibuat sistem pendataan di mana hasil user dapat melihat data tersebut. Salah satu sistem yang belum dibuat adalah pendataan fasilitas dengan alur Bottom Up atau pendataan fasilitas dengan melibatkan user tingkat bawah hingga tingkat atas. Dalam penelitian ini, sistem pendataan Bottom Up dibuat dengan melibatkan Ketua RT sebagai user pertama, sehingga data yang ada sama dengan data yang diberikan pusat.

E-government adalah sistem teknologi informasi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberi masyarakat pilihan untuk mendapatkan informasi publik dengan cara yang mudah dan mudah.

Dengan menggunakan sistem berbasis web yang diproses melalui penggunaan bahasa pemrograman web PHP dan database MySQL. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan maksimal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna sistem konvensional dalam hal pengelolaan, distribusi, pencarian, dan pengolahan data. Hasil ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengolahan data dari fasilitas sosial dan umum di Kantor Kecamatan Pasar Kemis.

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani), dari dua kata "ad" dan "ministrate" yang berarti "melayani" atau "memenuhi". Menurut Siagian dalam Pasolong "Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya."

Administrasi publik berusaha melembagakan praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat yang diperintah. Menurut Nicholas Henry dalam Sjamsudin, administrasi publik adalah kombinasi teori dan praktik yang kompleks.

Dari beberapa pengertian administrasi publik di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk membuat, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik. Tujuan administrasi publik adalah untuk mendorong kebijakan publik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.1.2 E-government (Electronic Government)

Karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, akurat, dan tepat, penggunaan teknologi saat ini tidak dapat dihindari. Teknologi berbasis web yang menggunakan jaringan internet adalah salah satu yang paling berkembang. Banyak bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan kesehatan, telah menggunakan teknologi ini. Teknologi ini, juga dikenal sebagai e-Government, adalah kemajuan teknologi saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat luas. Hasil dari penerapan teknologi digital oleh pemerintah dalam sistem birokrasi pemerintahan baru ini dikenal sebagai eGovernment.

Dalam Indrajit, Bank Dunia mengatakan bahwa "*e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*" Dengan kata lain, e-government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti area network yang luas, internet, dan perangkat lunak seluler). Namun, menurut Akadun, e-Government adalah pemrosesan teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan, atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas untuk transaksi dan izin.

Eddy Satriya juga mendefinisikan "e-government" sebagai upaya untuk menggunakan dan memanfaatkan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi pemerintah, memberikan berbagai layanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan akses publik terhadap informasi, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Pemerintah Federal Amerika Serikat memberi definisi e-Government sebagai berikut: "*E-Government refers to the delivery of government information and services online through the internet or other digital means*" (E-Government mengacu pada penyebaran informasi pemerintah dan layanan melalui internet atau cara digital lainnya).

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi e-Government di atas, dapat disimpulkan bahwa e-Government adalah penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Dalam praktiknya, e-Government memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk menyelesaikan tugas pemerintah dan menyediakan pelayanan publik.

1.1.3 Pelayanan Publik

Secara etimologis, "pelayanan" berasal dari kata "layanan", yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus "apa-apa yang diperlukan seseorang." Menurut Poerwadarminta dalam, pelayanan dapat diartikan sebagai cara melayani; servis atau jasa; sehubungan dengan jual beli barang atau jas. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengartikan pelayanan sebagai membantu orang lain menyiapkan dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa mereka.

Pelayanan publik, menurut Inu Kencana, adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah orang yang memiliki setiap tindakan yang menguntungkan suatu kumpulan atau kesatuan dan memberikan kepuasan, meskipun hasilnya tidak terkait dengan produk fisik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih, "pelayanan publik" atau "pelayanan umum" mencakup semua jenis jasa publik, baik barang publik maupun jasa publik, yang pada dasarnya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah pusat, daerah, dan BUMN atau BUMD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian dan penjelasan ini, terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: Pemerintah, sebagai penyelenggara pelayanan adalah unsur pertama; penerima berkepentingan adalah unsur kedua; dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan) adalah unsur ketiga.

1.1.4 Kebijakan dan Strategi Perkembangan e-Government di Indonesia

1.1.4.1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan e-Government, yang menetapkan rencana induk strategis untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasi pemerintahan. Instruksi Presiden ini berfungsi sebagai pedoman untuk semua lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan eGovernment. Oleh karena itu, diharapkan bahwa seluruh instansi pemerintah setuju dan mengintegrasikan langkah-langkah mereka untuk menerapkan dan mengembangkan e-Government.

Beberapa elemen sebagai berikut biasanya digunakan untuk mengevaluasi kapasitas untuk memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Yang pertama adalah ELeadership, yang berkaitan dengan prioritas dan upaya negara untuk mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua adalah Infrastruktur Jaringan Informasi; ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta kualitas, lingkup, dan biaya layanan akses. Yang ketiga adalah Pengelolaan Informasi, yang berkaitan dengan masalah terkait dengan pengelolaan informasi dan teknologi informasi secara umum; Keempat, lingkungan bisnis, mencakup kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk perkembangan teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi aliran informasi yang lancar antara pemerintah dan dunia usaha serta antara badan usaha dan masyarakat. Kelima, masyarakat dan sumber daya manusia, berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat dan bisnis.

Proses penerapan eGovernment di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang positif. Menurut Intruksi Presiden, beberapa kelemahan yang menonjol adalah sebagai berikut:

- a) Karena peraturan, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia yang sudah siap, pelayanan yang diberikan di situs web pemerintah tidak didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif;
- b) Strategi yang kurang dan anggaran yang tidak memadai untuk pengembangan eGovernment di masing-masing instansi;
- c) Upaya ini merupakan upaya organisasi secara pribadi, sehingga faktor-faktor seperti standardisasi, keamanan data, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja di lembaga pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu kurang diperhatikan;
- d) Strategi yang digunakan secara mandiri tersebut tidak cukup untuk mengatasi keterbatasan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet; akibatnya, jangkauan layanan publik yang dikembangkan menjadi lebih terbatas.

1.1.4.2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia didistribusikan kepada seluruh pejabat tinggi negara, gubernur, dan bupati/walikota di seluruh Indonesia. Tujuan instruksi ini adalah untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dan telematika.

1.1.5 Definisi Konsep

Berikut adalah definisi konsep yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan teori-teori di atas:

- a) Pelayanan publik adalah pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara atau daerah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
- b) E-government adalah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah atau publik. Tujuannya adalah untuk membuat hubungan tata pemerintahan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lebih efisien, efektif, transparan, dan produktif.
- c) Support, Capacity, dan Value adalah elemen-elemen sukses pengembangan e-Government. E-Government merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan digitalisasi sektor public
- d) Kerangka e-Government yang disepakati, penyediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, dan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti peraturan yang jelas dan lembaga yang khusus menangani e-Government, adalah elemen dukungan
- e) Elemen Capacity terdiri dari ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup, ketersediaan infrastruktur TI yang memadai, dan ketersediaan sumber daya manusia yang berpengalaman dan berbakat
- f) Elemen Value (manfaat), yaitu ketersediaan aplikasi eGovernment yang memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakatnya

2 METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data:

2.1 Metode Pengumpulan Data

- a) Observasi: Metode ini mengumpulkan data dengan melihat kegiatan di tempat penelitian secara langsung.

- b) Metode Wawancara :Metode ini mengumpulkan data dengan berbicara secara langsung dengan orang untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Oman Apriaman, SKM, seorang stakeholder di Kantor Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.
- c) Metode Studi Pustaka: Penulis mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian mereka dengan mencari informasi melalui buku-buku dan data lain yang relevan untuk membantu menganalisa sistem yang digunakan.

2.2 Metode Perancangan

Penelitian ini menggunakan metode atau model SDLC (Software Development Lyfe Cycle), yang terdiri dari beberapa tahapan:

a) Analisis Sistem

Setelah beberapa teknik digunakan untuk mengumpulkan data, data tersebut akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi penelitian ini.

b) Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Metode elisitasi digunakan untuk mengumpulkan semua kebutuhan sistem melalui wawancara. Ini dilakukan dalam tiga tahap: elisitasi tahap I mencakup seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan, elisitasi tahap II mengklasifikasikan elisitasi tahap I menurut metode MDI (wajib, diinginkan, dan tidak penting), dan elisitasi tahap III mengumpulkan penyusutan elisitasi tahap I.

c) System Design (Interview)

Pendekatan object-oriented, yaitu UML, digunakan untuk mendesain sistem ini. Dalam penelitian kuliah kerja praktek ini, diagram yang digunakan adalah use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram.

d) Pengembangan sistem

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah PHP. Software Visual Studio Code digunakan untuk menulis bahasa pemrograman tersebut, dan XAMPP adalah alat yang menggabungkan berbagai perangkat lunak ke dalam satu paket.

e) Integration and Testing

Black box testing adalah metode uji coba yang berfokus pada kebutuhan software, memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat fungsional program. Metode pengujian black box mencari beberapa jenis kesalahan. Ini termasuk kesalahan fungsi atau fungsi yang hilang, kesalahan interface, kesalahan struktur data atau akses ke database eksternal, kesalahan performa, kesalahan inisialisasi, dan terminasi.

f) Operation & Maintenance

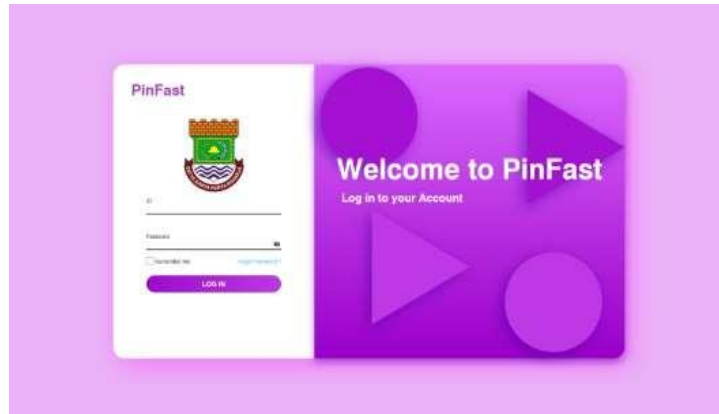
tahap akhir dari model SDLC. Perangkat lunak siap pakai dijalankan dan dipelihara. Memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya adalah bagian dari pemeliharaan. Ada kebutuhan baru untuk meningkatkan implementasi unit sistem dan jasa sistem.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis sistem yang sedang dilakukan pada bagian yang relevan di Kantor Kecamatan Pasar Kemis menunjukkan bahwa sistem pendataan infrastruktur dan fasilitas saat ini tidak memenuhi kebutuhan. Ini karena proses pengolahan data membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan untuk menemukan data fasilitas sosial dan umum saat diperlukan. Beberapa prosedur yang diusulkan bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendataan infrastruktur dan fasilitas yang berjalan saat ini, termasuk mengubah proses pendataan

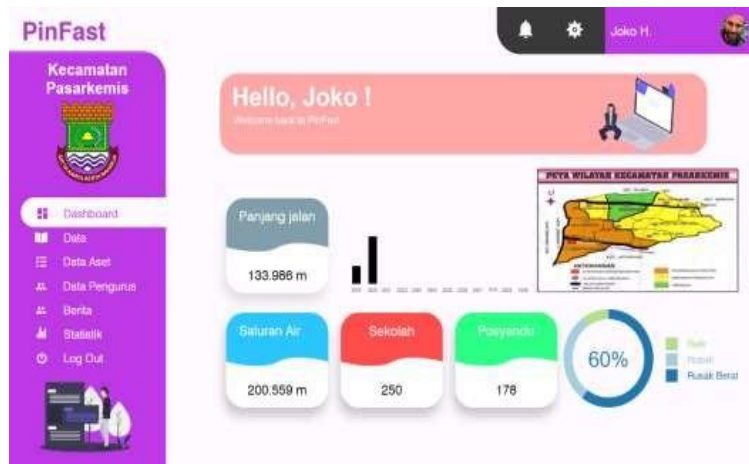
infrastruktur dan fasilitas yang berjalan saat ini menggunakan semi-komputer ke aplikasi pendataan infrastruktur dan fasilitas yang berbasis Web.

Untuk membuat perancangan sistem yang disarankan ini, flowchart dan diagram UML (Unified Modeling Language) digunakan. Software Umlet juga digunakan untuk membuat Usecase Diagram. Untuk membuat aplikasi Web, bahasa pemrograman PHP digunakan dengan framework CodeIgniter. Datasenya adalah MySQL, dan software pendukungnya adalah Visual Studio Code, yang berfungsi sebagai editor teks untuk menuliskan bahasa pemrograman yang akan dibuat, dan Xampp, yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu paket.



Gambar 1 Tampilan Login

Pada gambar 1 menggambarkan tampilan *login* untuk mengakses sebuah aplikasi yang dimana untuk mengaksesnya membutuhkan *username* dan *password*.



Gambar 2 Dashboard Admin

Pada gambar 2 menggambarkan tampilan *Dashboard* Admin untuk menampilkan ringkasan data yang ada di seluruh sistem.

The screenshot shows the 'Data Fasilitas Sosial' page in the PinFast application. It features a sidebar menu on the left with options like Dashboard, Data, Data Aset, Data Pengurus, Berita, Statistik, and Log Out. The main content area displays a table with the following data:

No.	Nama Fasilitas	Alamat	Kategori/Class	Kapasitas (Or)	Status	Therapy	Therapy
1	Musik	Dak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
2	Ajar	Pasah	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
3	Musik	Isak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
4	Penyembuhan	Pati Sindangari	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
5	Kat Sindangari (Kategori)	Kembang	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
6	Presepsi	Pasah	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
7	Musik	Tasak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
8	Kat Sindangari (Kategori)	Kembang	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
9	Musik	Isak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
10	Musik	Dak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%

Gambar 3 Data Fasilitas Sosial

Pada gambar 3 menggambarkan tampilan data fasilitas sosial dimana ditampilkan tabel berisi data kondisi fasilitas social.

The screenshot shows the 'Data Fasilitas Umum' page in the PinFast application. It features a sidebar menu on the left with options like Dashboard, Data, Data Aset, Data Pengurus, Berita, Statistik, and Log Out. The main content area displays a table with the following data:

No.	Nama Fasilitas	Alamat	Kategori/Class	Kapasitas (Or)	Status	Therapy	Therapy
1	Buku Aja	Dak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
2	Ajar Lindungan	Pasah	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
3	Ajar Lindungan	Isak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
4	Isak	Isak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
5	Isak	Pasah	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
6	Isak	Pasah	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
7	Ajar Lindungan	Pasah	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
8	Ajar Lindungan	Kembang	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
9	Ajar Lindungan	Isak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%
10	Ajar Lindungan	Dak	Kat Sindangari	10	100%	100%	100%

Gambar 4 Input Data Fasilitas Umum

Pada gambar 4 menggambarkan tampilan data fasilitas umum dimana ditampilkan table berisi data kondisi fasilitas umum.

The screenshot shows the 'Input Data Fasilitas Sosial' form in the PinFast application. The form includes the following fields:

- Form Header:** RT 002 RW 010 Sindangari
- Form Fields:**
 - Nama:** Input field with value "Pasar Isak"
 - Alamat:** Input field with value "Kat Sindangari"
 - Isi:** Input field with value "Isak"
 - Kat:** Input field with value "KAT"
 - Kapasitas (Or):** Input field with value "10"
 - Status:** Input field with value "100%
 - Therapy:** Input field with value "100%
 - Therapy:** Input field with value "100%
- Buttons:** "Simpan Data" and "Kembali ke Home" buttons.
- Footer:** "Input Data" button.

Gambar 5 Input Data Fasilitas Sosial

-
- [4] Erna Astiyani, Jihan Fahira & Dionysius Fajar Wicaksono. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Pasien Rawat Inap Berbasis Web. *JOURNAL CERITA*, VOL 7 NO 1 (2021).
- [5] Erna Astriyani, Fiskarina Nasyah Putri, Nurita Eka Widianingsih. 2020. Desain Sistem Informasi Monitoring Aset Pada PT. Arbunco Wira Pandega. *Journal SENSI*. Vol 6 No 1.
- [6] Harahap, E. P., Rahardja, U., & Salamuddin, M. (2019). Aplikasi Panduan dan Pembayaran Tiket Masuk Mendaki Gunung Menggunakan Metodologi Sistem Multimedia Luther-Sutopo. *SATIN-Sains dan Teknologi Informasi*, 4(2), 9-16.
- [7] Hermenda Ihut Tua Simamora, 2020, Perancangan Sistem Informasi Penjualan Cv Mitra Tani Menggunakan Metode Prototype. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)* Vol. 6 No. 2
- [8] Padeli, Refauza & Muhammad Rizky Awaluddin. 2020. Rancang Bangun SINKER (Sistem Inventori Alat-Alat Kerja) Berbasis Website. *JOURNAL CERITA*, VOL 6 NO 2.
- [9] Rabi'ah Oktaviyany, A. Jalaludin Sayuti & Heri Setiawan, 2020. Strategi Pengembangan Danau Tanah Mas Berbasis Analisis SWOT. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Desember 2020, ISSN 2746-4229.
- [10] Rachmat Destriana, Rochmat Taufiq, Bintang Eka Suryana. 2020. "Rancang Bangun Sistem Informasi Document Managemen System Pada Lkp ITC-Pcb Berbasis Web Menggunakan Uml Dan Php". *Jurnal Inovasi Informatika* Vol. 5 No. 1.
- [11] Riska Ade Ayu Afrinda, Bambang Irawan & Kheyene Molekandella Boer. (2020). Interaktivitas Website Belimbing.Id Sebagai Media Komunikasi Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Masyarakat Di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 8 (1): 2020 : 88-102.
- [12] Tuti Nurhaeni, Era Era Hia, Putu Aditya Eka Pratama. 2019. "Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Masyarakat Kurang Mampu Dalam Mendukung Program Umkm Di Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang". *Jurnal SENSI* Vol 5 No 1.
- [13] Widiawati & Hairil Kurniadi Siradjuddin., (2020). Perancangan Website Sistem Seleksi Siswa Baru menggunakan Framework CodeIgniter Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO*, Vol 3, No 2.
- [14] Yudin Wahyudin dan Dhian Nur Rahayu. 2020. Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: a Literatur Review. *Jurnal INTERKOM*. Vol. 15 No.3 : 31-32.